

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait mitigasi non struktural yang ditemui dalam literatur, berikut penelitian terdahulu memiliki perbedaan maupun kesamaan dengan pembahasan yang peneliti angkat:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi
1	Nina Ismayani, Hary Febrianto, Nanda Okta Vianda. 2022 Perangkat Nagari Sungai Janiah dan Kelompok Masyarakat Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, menerima Pelatihan Mitigasi Bencana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penting dipertimbangkan saat membuat program mitigasi, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah ketersediaan informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap kategori bencana; kedua, sosialisasi untuk	Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal pemetaan Kawasan yang menjadi tempat terjadinya rawan bencana tanah longsor, melakukan sosialisasi bagi masyarakat dalam pemahaman serta kesadaran masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, mitigasi bencana tidak dilakukan sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat, tidak adanya pembelajaran mengenai

		<p>meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang cara menghadapi bencana; dan ketiga, mitigasi bencana harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Ketiga, memberikan instruksi terbaru tentang cara memperbaiki bangunan atau rumah yang rusak akibat bencana alam. Keempat, memahami dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata guna lahan dan klasifikasi lahan. Ini dilakukan untuk</p>	<p>renovasi rumah pada saat setelah terjadinya bencana.</p>
--	--	---	---

		<p>memberi masyarakat pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka sehingga mereka dapat menyelamatkan dan meminimalkan bencana alam. Kelima, menyediakan modul atau buku yang memberikan pengetahuan tentang mitigasi bencana yang mudah dipahami.</p>	
2	<p>Khoirun Nisadiah Fitri Dianti, 2021, Kelompok Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Sariwani Probolinggo Mengorganisasikan Masyarakat untuk Mencegah Bencana Tanah Longsor</p>	<p>Dalam penelitian ini, proses mitigasi terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah proses inkulturasi untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan masyarakat, kelompok umat, budaya, bahasa, dan</p>	<p>Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal pembentukan kelembagaan yakni terbentuknya DESTANA di Desa Sariwani melalui penelitian sebelumnya, penguatan kesadaran masyarakat dalam Langkah-langkah mitigasi dan</p>

		<p>kebiasaan di Desa Sariwani. Tahap kedua adalah pemetaan bersama masyarakat untuk mengidentifikasi subjek dampingan di Desa Sariwani. Selanjutnya, peneliti menemukan informasi tentang kehidupan masyarakat dan komunitas yang sudah ada. Ketiga, agenda penelitian bersama disepakati oleh masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, langkah berikutnya adalah berkomunikasi dan bekerja sama dengan BPBD dan DESTANA, dua lembaga yang</p>	<p>penerapannya. Sosialisasi mitigasi bencana. Adapun perbedaan dalam penelitian ini menerapkan kerangka hukum dalam mitigasi bencana, memberikan bantuan kepada para korban bencana tanah longsor, dan penerapan EWS (<i>Early Warning System</i>)</p>
--	--	---	---

	<p>bertanggung jawab atas kebencanaan. Keempat, dinamika proses perumusan masalah membicarakan dengan masyarakat tentang masalah kebencanaan di Desa Sariwani dan menentukan wilayah mana yang rawan bencana. Kelima, pihak berwenang yang terlibat dalam penelitian adalah pemerintah Desa Sariwani, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan DESTANA. Keenam, Sosialisasi Siaga Bencana Tanah Longsor BPBD dilakukan untuk</p>	
--	---	--

		<p>meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana dan berbagi pengetahuan tentang cara mencegah bencana. Ketujuh, pembentukan kembali tim siaga bencana, termasuk pembina, penasihat, koordinator, sekretaris, bendahara, dan regu kebencanaan. Tiga anggota tim BPBD menghadiri kedelapan simulasi bencana tanah longsor untuk menjelaskan lokasi longsor, peran korban, kelompok siaga, dan penerapan alat peraga dan rambu rawan bencana tanah longsor. Salah satu</p>	
--	--	---	--

		<p>keuntungan dari sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang apa yang mereka ketahui dan alami saat menghadapi bencana. Ini termasuk sembilan metode untuk melacak dan menilai hasil yang dicapai.</p>	
3	<p>Vira Ananda Z, Hasti W, Jamilia K. 2022. Studi Kasus: Lereng Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk, Desa Sendangrejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, dan Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul,</p>	<p>Berdasarkan temuan dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa melakukan perencanaan untuk penggunaan talud sebagai penahan longsor, menggerakkan satuan tugas saat hujan terus-menerus, mitigasi</p>	<p>Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam melakukan mitigasi sesuai dengan Undang-undang, melakukan sosialisasi dan edukasi, mengerahkan organisasi atau satuan mitigasi saat terjadinya bencana tanah longsor. Perbedaan dalam penelitian tersebut memberikan bantuan kepada</p>

	<p>Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor</p>	<p>struktur, menanam vegetasi seperti pohon yang memiliki akar yang kuat untuk mengkeraskan tanah dan memiliki ketahanan jika terjadinya suatu gerakan tanah atau lereng di sekitar pemukiman, dan daun-daun di sekitar pemukiman, Mitigasi non-struktural, penerapan sistem peringatan dini, pengorganisasian organisasi penanggulangan bencana.</p>	<p>para korban bencana tanah longsor,</p>
4	<p>Atas P, Gusti A.A, Baiq N.R.M 2023. Upaya Mitigasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga cara untuk</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini melakukan sosialisai dan edukasi mengenai mitigasi</p>

	<p>Bencana Non-Struktural Di Daerah Rawan Bencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanting, Kecamatan Sambelia</p>	<p>mengurangi dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Yang pertama adalah dengan membuat peta daerah rawan bencana dan menetapkan jalur evakuasi. Yang kedua adalah dengan memasang rambu-rambu di jalur evakuasi untuk mengamankan dan menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Yang ketiga adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi untuk bertujuan dan memberikan informasi tentang daerah yang memiliki potensi</p>	<p>bencana kepada masyarakat, pemetaan wilayah yang sering terjadinya bencana tanah longsor. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut tidak adanya bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor, menerapkan sistem peringatan dini EWS (<i>Early Warning System</i>) agar masyarakat mampu mengakses pergerakan tanah dalam tiap saat.</p>
--	--	--	--

		bencana dan berbagai potensial bencana.	
5	Tri G.S, Riko M, Yoszi M.A, Harizona A.R, Rizio S.Z. 2020. PKM Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam di SMA N 2 Kota Solok.	Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa mitigasi terdapat dua macam mitigasi structural dan non-structural mitigasi structural mengurangi bencana alam dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana fisik contoh memanfaatkan pembangunan kanal, melakukan pembangunan dengan struktur pembangunan yang tahan terhadap gempa. kemungkinan akan terjadi, melalui praturan dan kebijakan tertentu contohnya	Persamaan dalam penelitian ini menjelaskan tentang mitigasi secara non-struktural mengenai bencana tanah longsor. Adapun perbedaan dalam penelitian ini sosialisasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana terhadap masyarakat, pemberian bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah bencana tanah longsor.

		sosialisasi, pelatihan, dan peraturan perundang-undangan.	
--	--	---	--

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, maka kebaruan sekaligus perbedaan yang ditemukan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terkait implementasi mitigasi bencana tanah longsor non-struktural di masyarakat pedesaan dengan menggunakan teori mitigasi non-struktural oleh William Nick Carter. Adapun kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu terletak dalam pelaksanaan mitigasi bencana secara non-struktural, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Implementasi Mitigasi Bencana

Implementasi untuk mencegah bencana, menurut Joko (2011: 279). serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bencana, termasuk pembangunan fisik, pendidikan masyarakat. Menurut definisi di atas, implementasi mitigasi bencana adalah langkah untuk meminimalkan risiko bencana melalui penerapan tindakan penanggulangan bencana tanah longsor.

Mitigasi bencana didefinisikan sebagai "upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda". Dengan demikian, mitigasi bencana adalah upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi

bencana guna mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut.
menurut Giri (2017:15)

Adapun definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai berikut:

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa bencana dapat mengganggu bencana baik yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi, dan tanah longsor, serta bencana non alam seperti kegagalan teknologi, ketinggalan zaman, wabah penyakit, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ada tiga jenis bencana, di antaranya adalah:

1. Bencana Alam

Bencana secara alami tanpa ada campur tangan manusia, seperti tsunami, tanah longsor dan lain sebagainya.

2. Bencana Non-Alam

Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena alam.

3. Bencana Sosial

Bencana yang disebabkan oleh manusia adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

2.2.2 Tanah Longsor

Menurut Arsyad (1989) menyatakan tanah longsor disebabkan oleh tertampungnya suatu air di dataran tinggi bercampur dengan tanah dan batuan yang dimana sewaktu-waktu akan meluncur jika sudah tidak bisa menahan tampungan air tersebut dan menyebabkan menimpa daerah yang berada di bawahnya.

Menurut Brook (1991), tanah longsor adalah jenis gerak massa tanah, batuan, dan runturan tanah yang terjadi seketika yang dikendalikan oleh gaya gravitasi dan meluncur dari atas lapisan ke bawah yang jenuh air. Oleh karena itu, tanah longsor dapat dianggap sebagai salah satu jenis erosi.

2.2.3 Non-Struktural

Mitigasi non struktural menurut Wigyono A (2018), Mitigasi nonstruktural mencakup upaya untuk mengurangi kemungkinan resiko yang bentuknya menyesuaikan dan diatur oleh kegiatan manusia, atau juga dikenal sebagai upaya manusia menyesuaikan diri terhadap alam. Contoh upaya mitigasi nonstruktural termasuk penetapan peraturan yang berkaitan dengan mitigasi bencana, seperti zonasi dan perizinan dalam pemanfaatan lahan, pembatasan layanan sarana pada wilayah yang resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya alam. Mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan dikenal sebagai mitigasi non-struktural. Menurut William N.C. (1991).

2.2.4 Masyarakat Pedesaan

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 166-167), perkembangan masyarakat pedesaan sebenarnya progresif. Masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih erat dan mendalam daripada masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kekeluargaan mengatur sistem kehidupannya.

Dalam bahasa Inggris, istilah "masyarakat" berasal dari kata Latin "*socius*", yang berarti "kawan". Istilah "masyarakat" juga berasal dari kata Arab "syaraka", yang berarti "ikut serta, berpartisipasi." Istilah "berinteraksi" mengacu pada kelompok orang yang hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain. Menurut Koentjaraningrat (2015: 116-118), J.L. Gillin dan J.P. Gillin mendefinisikan masyarakat sebagai komponen kesatuan hidup, adat-istiadat, dan kontinuitas, serta identitas bersama.

Masyarakat tradisional, juga disebut sebagai masyarakat desa, hidup berdasarkan tradisi atau kebiasaan lama. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal baru yang menuntut sikap rasional karena keterikatan tersebut. Akibatnya, menjadi kurangnya dalam hal pemikiran yang lebih mendalam (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Masyarakat desa tidak mengalami perubahan atau dinamika dalam kehidupannya. (J Bouman, 1980: 53)

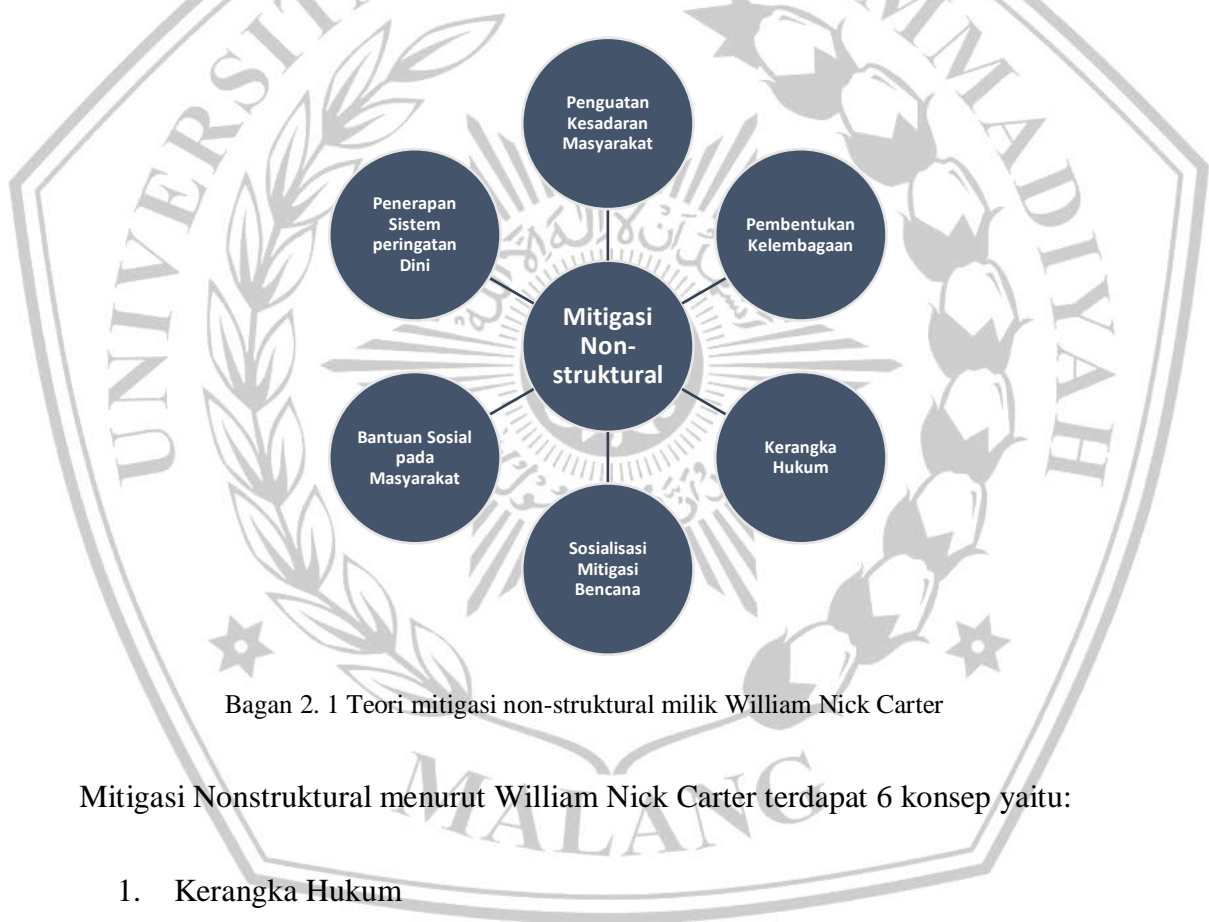
2.2.4.1 Ciri- ciri masyarakat pedesaan

Masyarakat ditandai oleh empat ciri, menurut Abdul S (2005). Mereka adalah interaksi, adanya memiliki ciri khas dalam hal tingkah laku dalam aspek kehidupan dan memiliki rasa kekompakan dan kebersamaan dalam masyarakat satu sama lainnya. Menurut Soerjono (2006) masyarakat memiliki karakteristik utama sebagai pergaulan hidup atau cara hidup bersama manusia.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Mitigasi Non-Struktural

Penelitian ini menggunakan teori mitigasi non-struktural, peneliti akan mendeskripsikan implementasi mitigasi bencana tanah longsor non-struktural di masyarakat pedesaan Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo menggunakan teori Mitigasi Non-struktural yang dikemukakan oleh William Nick Carter. Mitigasi Non-struktural merupakan serangkaian upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan.



Bagan 2. 1 Teori mitigasi non-struktural milik William Nick Carter

Mitigasi Nonstruktural menurut William Nick Carter terdapat 6 konsep yaitu:

1. Kerangka Hukum

Menurut W.N. Carter, mitigasi non-struktural bisa dicapai melalui penerapan kerangka hukum yang berfungsi dalam hal dasar hukum yang mendasar untuk melakukan mitigasi. Juga dikenal sebagai kebijakan, adalah alat administrasi

publik yang memungkinkan aktor, organisasi, dan sumber daya lainnya berkolaborasi untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur semua tentang penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencakup upaya mitigasi.

2. Pembentukan Kelembagaan

W.N. Carter percaya bahwa dalam mitigasi bencana memiliki nilai strategis dengan peranan kelembagaan karena mereka dapat membangun mekanisme mitigasi yang komprehensif. Lembaga merupakan hubungan dan tatanan dengan individu dalam suatu organisasi atau jaringan yang dapat menentukan jenis hubungan antara individu atau organisasi dalam jaringan.

3. Sosialisasi Mitigasi Bencana

W, N. Carter mengatakan bahwa cara dalam risiko bencana untuk menguranginya adalah program mitigasi. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa masyarakat menyadari dan peduli dengan kemungkinan bencana adalah melalui partisipasi masyarakat.

Karena masyarakat adalah aktor dan pihak yang paling penting dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana, partisipasi dalam Keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi akan meningkatkan pemahaman mereka tentang resiko bencana pada lingkungan tempat mereka tinggal dan memberikan pemahaman tentang apa yang harus mereka lakukan jika terjadi bencana.

4. Penguatan Kesadaran Masyarakat

Untuk mitigasi bencana harus dengan pelatihan dan melakukan sosialisasi yang dapat dipahami harus digunakan, menurut WN Carter. Penerapannya, dalam lingkup daerah melakukan kegiatan seperti pelatihan dan pendidikan untuk mendidik masyarakat tentang mitigasi bencana.

5. Bantuan pada Masyarakat

Bantuan disini maksudnya adalah menggambarkan aksi pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak dari bencana tanah longsor. Bantuan tersebut bisa berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, bantuan medis, atau bantuan lainnya yang diperlukan untuk membantu pemulihan dan pemulangan masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut.

Menurut W.N. Carter, keberhasilan program mitigasi bencana didorong oleh bantuan masyarakat, yang dimaksudkan sebagai subsidi pendanaan yang diperoleh BPBD. Diharapkan bahwa ini akan membantu program mitigasi berjalan lancar.

6. Penerapan Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memberi tahu masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana sesegera mungkin. Apakah sistem informasi yang diberikan jelas dan mudah dipahami merupakan faktor yang mempengaruhi upaya untuk mengurangi risiko bencana.

Di sini, *Early Warning System (EWS)* diharapkan dapat dipahami oleh siapa pun yang melihatnya. Variabel seperti teknologi dan ketersediaan sumber daya memengaruhi sistem peringatan. Menurut Carter tentang evaluasi, dan mudah

diakses sangat diperlukan. Dengan alat sistem pergerakan tanah dapat mencapai semua lini yang ada di tempat tersebut.

BPBD melakukan penerapan sistem peringatan dini dengan bekerja sama dengan pihak Badan Geologi dengan alasan pihak BPBD sendiri masih belum memiliki alat untuk mendeteksi terjadinya gerakan tanah, BPBD tidak bisa memperbarui gerakan tanah setiap harinya. Namun demikian, setiap bulannya akan terjadi pembaharuan mengenai pergerakan tanah di daerah Kab Probolinggo sesuai dengan laporan yang dikirim oleh Badan Geologi.

